

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan sifat pemakaiannya persediaan dikelompokkan menjadi tiga yaitu persediaan barang habis pakai, barang tak habis pakai, dan barang bekas pakai.

Setiap Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan operasional tentu didukung dengan adanya persediaan. Persediaan biasanya didapatkan dengan cara membeli. Instansi Pemerintah pasti akan melakukan pencatatan atas persediaan yang didapatkan dengan acuan yang ada (WS Ayuningtyas 2020). Persediaan BPK RI Perwakilan Provinsi Banten berpedoman pada PMK Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP).

Persediaan yang ada di BPK RI Perwakilan Provinsi Banten berperan penting untuk alat pendukung kegiatan kantor seperti Alat Tulis Kantor (ATK) untuk keperluan bekerja, Alat Rumah Tangga Kantor (ARTK) untuk keperluan kebersihan di kantor, obat-obatan untuk keperluan kesehatan para pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Banten karena BPK RI Perwakilan Provinsi Banten memiliki klinik kesehatan, dan bahan bakar minyak untuk keperluan perjalanan dinas, alat-alat listrik dan elektronik untuk keperluan pendukung kegiatan kantor.

Jenis persediaan yang ada di BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, terdapat dua jenis persediaan yaitu persediaan barang habis pakai dan persediaan barang tak habis pakai. Perlakuan akuntansi persediaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten berpedoman pada PMK Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Pencatatan persediaan berdasarkan klasifikasi di BPK RI Perwakilan Provinsi Banten tidak memiliki dalam bentuk tulisan yang berupa *softcopy* atau *hardcopy*. Hal ini dikarenakan pencatatan persediaan berdasarkan klasifikasi hanya terdapat di “Aplikasi Persediaan” sesuai dengan kodefikasi.

Menurut PMK Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventaris fisik. Pengakuan persediaan dibuktikan melalui kuitansi, faktur, Berita Acara Serah Terima (BAST). Setelah persediaan diperoleh, persediaan perlu diukur atau diperhitungkan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir (HPT). HPT tersebut didapat dari total bukti pembelian persediaan.

Perlakuan pencatatan persediaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, menggunakan dua basis, terdiri dari basis akrual dan basis kas. Hal ini berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat



transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar. Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, satuan kerja melaksanakan inventarisasi fisik (*stock opname*) persediaan yang dilakukan setiap semester. Untuk selanjutnya berdasarkan hasil inventarisasi fisik tersebut dilakukan penyesuaian data nilai persediaan. Persediaan yang telah usang/rusak diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan selisih inventaris fisik. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk membahas “**Perlakuan Akuntansi Persediaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana klasifikasi persediaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten?
2. Bagaimana perolehan persediaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten?
3. Bagaimana pengakuan persediaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten?
4. Bagaimana pengukuran persediaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten?
5. Bagaimana perlakuan pencatatan persediaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten?
6. Bagaimana penghapusan persediaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten?
7. Bagaimana penyajian dan pengungkapan persediaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten?
8. Bagaimana perbandingan ketentuan kebijakan akuntansi persediaan dengan pelaksanaan kebijakan akuntansi persediaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten?
9. Bagaimana kendali/*control* terhadap persediaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah:

1. Memberikan informasi mengenai klasifikasi persediaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten.
2. Menguraikan perolehan persediaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten.
3. Menguraikan pengakuan persediaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten.
4. Menguraikan pengukuran persediaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten.
5. Menguraikan perlakuan pencatatan persediaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten.

6. Menguraikan penghapusan persediaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten.
7. Memberikan informasi penyajian dan pengungkapan persediaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten.
8. Memberikan informasi perbandingan ketentuan kebijakan akuntansi persediaan dengan pelaksanaan kebijakan akuntansi persediaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten.
9. Memberikan informasi kendali/*control* terhadap persediaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Penulis
Penulisan tugas akhir ini diharapkan memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai perlakuan akuntansi persediaan pada pemerintahan.
2. BPK RI Perwakilan Provinsi Banten
Penulisan tugas akhir ini diharapkan menjadi bahan evaluasi perihal perlakuan akuntansi persediaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten.
3. Pembaca Umum
Penulisan tugas akhir ini diharapkan memberikan referensi kepada pembaca umum untuk menambah pengetahuan mengenai perlakuan akuntansi persediaan di instansi pemerintahan, khususnya di BPK RI Perwakilan Provinsi Banten.
4. IPB *University*
Penulisan tugas akhir ini sebagai bahan referensi untuk mahasiswa/i yang ada di IPB *University* mengenai perlakuan akuntansi persediaan di instansi pemerintah.

